

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka pada penelitian ini dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2024. Semakin tinggi tingkat kemandirian, semakin mudah pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur untuk mempertanggungjawabkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya, sehingga akuntabilitas pelaporan keuangan semakin baik.
2. Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2024. Semakin efektif Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi atau baik tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.
3. Efisiensi belanja daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2024. Semakin efisien belanja daerah, maka akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur akan semakin meningkat atau semakin baik.

4. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2024. Semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, maka semakin rendah atau semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang baik.
5. Derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2024. Tinggi atau rendahnya derajat desentralisasi, tidak memengaruhi baik-buruknya kualitas pelaporan keuangan dan transparansi yang disajikan oleh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.

B. Implikasi

Penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Secara teoritis temuan penelitian ini berimplikasi dalam memperkuat konsep desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa kemandirian fiskal memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur keuangannya sendiri. Implikasi praktis dari temuan penelitian ini adalah pemerintah daerah perlu menggali potensi ekonomi lokal secara maksimal guna meningkatkan kemandiriannya. Semakin mandiri daerah, semakin kuat pula dorongan untuk menyajikan laporan keuangan yang kredibel kepada masyarakat.

Adanya pengaruh positif variabel efektivitas PAD yang memaparkan bahwa semakin efektif Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu pemerintah daerah, semakin tinggi dan baik pula tingkat akuntabilitas pelaporan keuangannya. Penelitian ini secara teoritis membuktikan bahwa tata kelola penerimaan daerah yang efektif tercermin dalam kualitas dan ketaatan penyusunan laporan keuangan. Implikasi praktis dari temuan penelitian ini adalah pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah menggunakan sistem digital yang terintegrasi untuk mencegah kebocoran, sehingga dana yang terkumpul dapat dilaporkan secara akuntabel.

Adanya simpulan yang menjelaskan bahwa variabel efisiensi belanja daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah, maka secara teoritis berimplikasi bahwa pemerintah daerah yang mampu mengalokasikan anggaran secara hemat, tepat sasaran, dan sesuai standar menunjukkan kapabilitas tata kelola yang baik. Implikasi praktis dari temuan penelitian ini adalah pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan internal dan perencanaan anggaran. Belanja yang efisien memudahkan penyusunan pelaporan keuangan yang akuntabel dan meminimalisir temuan penyimpangan oleh auditor.

Penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Secara teoritis temuan penelitian ini berimplikasi bahwa tingginya dana transfer, seperti Dana Alokasi Umum/Khusus (DAU/DAK) dapat memicu fenomena *flypaper effect*,

dimana pemerintah daerah cenderung kurang berhati-hati dan memiliki tata kelola pelaporan yang lebih lemah. Implikasi praktis dari temuan penelitian ini adalah pemerintah daerah tidak boleh terlena dengan dana transfer. Ketergantungan ini menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan ekstra guna memastikan dana dari pusat tersebut dipertanggungjawabkan dengan standar pelaporan yang tinggi.

Adanya simpulan yang menjelaskan bahwa variabel derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah, maka secara teoritis menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang pusat ke daerah atau desentralisasi belum tentu menjamin peningkatan akuntabilitas jika tidak dibarengi dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik. Implikasi praktis dari temuan penelitian ini adalah bawa sekadar menerima kewenangan otonomi daerah saja tidak cukup. Pemerintah daerah harus fokus pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang ketat agar pelaporan keuangan tetap akuntabel.

C. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang mungkin dapat melemahkan hasil, beberapa keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meneliti lima faktor yang diduga dapat mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan, yaitu tingkat kemandirian daerah, efektivitas PAD, efisiensi belanja daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan derajat desentralisasi. Masih banyak faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji koefisien determinasi (*Nagelkerke R Square*) yang membuktikan bahwa kemampuan variabel tingkat kemandirian daerah, efektivitas PAD, efisiensi belanja daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan derajat desentralisasi dalam mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan hanya sebesar 27,7% dan sisanya sebesar 72,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

2. Periode penelitian hanya pada tahun 2015-2024 sehingga belum bisa melihat kecenderungan (*trend*) akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah atau organisasi lain dalam jangka panjang.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang diuraikan di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur
 - a. Akuntabilitas pelaporan keuangan merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat yang besar dalam pengelolaan keuangan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur harus mampu menjadi pemerintah daerah yang mandiri dan berkinerja.
 - b. Pimpinan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur sebaiknya meningkatkan pengendalian internal dalam pelaksanaan APBD sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran dan menyampaikan Laporan

Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga mendapatkan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) audited yang baik dari BPK RI yang dalam hal ini, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Bagi penelitian selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang secara teoritis dapat mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan, seperti: dinasti politik, ukuran pemerintah daerah, dan ukuran legislatif. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan dapat dilakukan dengan menambah periode tahun yang diteliti sehingga dapat melihat kecenderungan (*trend*) akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah dalam jangka waktu yang cukup panjang karena penelitian ini hanya menggunakan periode 2015-2024 atau dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.